

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN KOPERASI PADA KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA (KPRI) DI KABUPATEN KLATEN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mendapatkan

Gelar Sarjana Ekonomi

Jurusan Akuntansi



Disusun Oleh:

FAIQOTUL HIMMAH

B200 040 106

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan wujud dari usaha untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi sebagai suatu system yang turut serta mewarnai kehidupan perekonomian Indonesia telah memiliki legalitas tersendiri yang tertuang dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992.

Koperasi merupakan organisasi yang terbuka, terutama bagi para anggotanya. Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya berakhlak mulia, termasuk kewirausahaan profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif dan mandiri, koperasi mampu menjadi bangun usaha utama dalam perekonomian.

Sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial, koperasi memiliki banyak perbedaan dengan bentuk perusahaan lainnya, namun bila dilihat dari segi kebutuhannya terhadap jasa akuntansi, koperasi juga membutuhkan jasa akuntansi baik untuk mengolah data keuangan guna menghasilkan informasi

keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan terhadap praktek pengelolaan usahanya. Laporan keuangan sebagai sumber informasi harus dapat dimengerti oleh para pemakainya, terutama bagi pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan koperasi adalah bank, kreditur kantor pajak, calon anggota dan anggota serta pihak lainnya mengharapkan agar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) sebagai salah satu jenis koperasi menerapkan Standar Akuntansi Koperasi. Oleh karena itu pemahaman mengenai laporan keuangan sangat penting, sebab salah pengertian terhadap laporan keuangan akan menghasilkan keputusan yang salah serta dapat membawa koperasi menuju kebangkrutan.

Dalam laporan keuangan tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan SHU yang diperoleh sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya.

Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, dan ketidaktepatan. Untuk meminimumkan bahaya ini, profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang disebut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (*generally accepted accounting principle*). Di Indonesia prinsip akuntansi ini disusun dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar akuntansi adalah pedoman pokok penyusunan dalam penyajian laporan keuangan yang harus diacu oleh setiap perusahaan dalam penyusunan

laporan keuangannya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia telah menertibkan Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) No.27 tentang akuntansi perkoperasian, sebagai suatu penyelenggaraan koperasi di Indonesia, utamanya dalam hal prinsip-prinsip akuntansi yang perlu diterapkan dalam penyajian laporan keuangan koperasi. Sebagai suatu standar yang telah ditetapkan, maka sudah selayaknya PSAK No.27 ini diterapkan oleh koperasi Di Indonesia.

Penerapan PSAK No.27 yaitu tentang akuntansi perkoperasian diwujudkan dalam bentuk penyajian laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Untuk penyajian neraca, komponen-komponen terdiri dari aktiva kewajiban dan ekuitas. Ekuitas terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) belum dibagi.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Ary Ermawati (UMS 2001) yaitu tentang analisis penerapan penyajian laporan keuangan koperasi menurut PSAK No.27 tentang akuntansi perkoperasian (suatu survey di Salatiga). Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa koperasi-koperasi di Salatiga sudah sesuai dengan yang dikehendaki Standar Akuntansi Keuangan (SAK) walau pelaksanaannya belum maksimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya peneliti mengaplikasikan pada obyek penelitian yang lain. Penelitian terdahulu

dilakukan di KPRI yang ada di Salatiga, sedangkan penelitian ini dilakukan di KPRI Klaten.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN KOPERASI PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) DI KABUPATEN KLATEN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dibuat perumusan masalah yaitu Apakah Standar Akuntansi Keuangan No.27 telah diterapkan secara memadai oleh KPRI di Klaten?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya mengenai analisis laporan keuangan berdasar penerapan Standar Akuntansi Keuangan koperasi.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang dihadapi, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap berkenaan dengan penerapan PSAK No.27 pada KPRI di Klaten.

2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi perkoperasian dalam penyusunan laporan keuangan pada KPRI di Klaten telah diterapkan sesuai dengan PSAK No.27.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Koperasi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan sejauh mana KPRI mentaati akuntansi yang berlaku.

2. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui apakah PSAK No.27 tentang akuntansi perkoperasian telah diterapkan di KPRI Klaten.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan dan tambahan referensi tentang sejauh mana suatu standar akuntansi telah disosialisasikan dan diterapkan, khususnya pada PSAK No.27 tentang akuntansi perkoperasian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang melandasi pemilihan judul, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang pengertian SAK, pengertian koperasi dan laporan keuangan secara umum, fungsi akuntansi perkoperasian, latar belakang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.27, proses akuntansi perkoperasian berdasarkan PSAK No.27, proses penyusunan laporan keuangan, standar khusus akuntansi untuk koperasi, serta tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengambilan data serta analisis data.

BAB IV: PELAKSANAAN DAN PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, gambaran data yang terkumpul, pengujian data dan analisis data penelitian.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan dibahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian, serta saran-saran yang diperlukan.